

Pj Bupati Minta Pusat Ikut Bantu Tangani Jalan Rusak di Bekasi

CIKARANG (IM) - Menyandang predikat daerah pemilik kawasan industri terbesar se-Asia Tenggara hingga penyumbang penerimaan negara paling tinggi dari sektor pajak industri, tak lantas menjamin pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bekasi berjalan optimal.

Dihuni 7.339 perusahaan dengan 11 kawasan industri besar, realisasi pembangunan infrastruktur di wilayah itu masih jauh tertinggal dari hiruk pikuk mesin produksi. Perbedaan tersebut makin terasa saat pengendara melintasi sejumlah ruas kabupaten yang tak semulus jalan kawasan industri.

Kondisi ini sudah berlangsung selama puluhan tahun dan sederet kepala daerah yang pernah menjabat pun tidak mampu menuntaskan persoalan dasar itu. Bahkan justru semakin menambah daftar panjang pekerjaan rumah yang harus dituntaskan pemimpin berikutnya.

Di sisi lain, program akselerasi pembangunan infra-

struktur Pemerintah saat ini telah menyentuh sebagian besar wilayah Indonesia, termasuk proyek strategis nasional yang melintasi Kabupaten Bekasi, sebagai jalur perekonomian utama koridor timur Jakarta atau wilayah penyangga Ibu Kota Jakarta.

Namun mengapa daerah tujuan primadona pencari kerja di Indonesia itu masih menyisakan permasalahan paling mendasar yang menjadi kebutuhan utama masyarakat? Persoalan serupa pernah dialami Provinsi Lampung beberapa waktu lalu hingga bebod di jagat media sosial.

Penjabat Bupati Bekasi, Dani Ramdan mengatakan butuh anggaran sebesar Rp 40 triliun untuk dapat merealisasikan pembangunan secara menyeluruh pada tahun 2024 berdasarkan sekitar 8.000 usulan masyarakat melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan.

“Sementara, postur pembiayaan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah itu dipastikan tidak akan mampu membiayai seluruh beban pembangunan infrastruktur berdasarkan kebutuhan masyarakat mengingat keterbatasan kemampuan keuangan daerah yang hanya berkisar Rp6-7 triliun per tahun,” kata Dani.

Pemerintah daerah setempat pun memutar otak demi memenuhi kebutuhan dasar yang berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat dengan menempatkan sektor infrastruktur sebagai salah satu program prioritas.

Sejumlah opsi diupayakan mulai dari implementasi program percepatan pembangunan, optimalisasi penambahan pendapatan daerah, juga mendorong kontribusi dunia usaha. Termasuk pengajuan permohonan bantuan kepada Pemerintah Provinsi Jabar dan Pemerintah Pusat meski hingga kini belum terealisasi. ● yan

4 | Metropolis

IDN/ANTARA



TOILET UMUM BERBASIS TEKNOLOGI

Warga menggunakan fasilitas toilet umum berbasis teknologi di kawasan Sudirman, Jakarta, Minggu (9/7). Untuk toilet umum dengan pengalaman penggunaan yang menyenangkan dan fasilitas yang bersih serta aman tersebut warga dapat membayar secara tunai atau uang elektronik sebesar Rp5.000.

Senam, Olahraga Wajib Bakal Diterapkan di Sekolah Jakarta

“Kami sangat mendukung kebijakan ini, karena senam merupakan olahraga yang mudah dilakukan, di mana saja dan kapan saja, dan dapat meningkatkan komponen utama kebugaran para pelajar. Seperti daya tahan aerobik, kekuatan, fleksibilitas, koordinasi dan lain-lain,” kata Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga Dispora DKI, Tedi Cahyono.

JAKARTA (IM) - Menteri Pemuda dan Olahraga (Mempora) Republik Indonesia (RI), Dito Ariotedjo mengeluarkan

kebijakan senam atau gimnastik menjadi olahraga wajib di sekolah. Menanggapi hal ini, Pemerintah Provinsi (Pemp-

prov) DKI Jakarta melalui Dinas Pendidikan Olahraga (Dispora) menyatakan mendukung kebijakan tersebut, Pemerintah perlu bersinergi dengan berbagai stakeholder dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk berolahraga, termasuk di sekolah-sekolah.

“Kesadaran masyarakat untuk berolahraga memberikan kontribusi dalam pembangunan individu dan masyarakat yang cerdas, sehat, terampil, tangguh, kompetitif, sejahtera, dan bermartabat,” ujarnya.

Menurut Teddy, langkah yang akan dilakukan Dispora DKI Jakarta sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan tersebut adalah dengan mengadakan program penyediaan instruktur senam yang bersertifikasi. Instruktur senam ini akan menjadi duta senam yang bertugas mengedukasi gerakan dasar dan mengimprovisasi gerakan dari berbagai jenis senam yang ada.

“Tidak kalah penting, kami akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Badan Pembina Olahraga Pelajar Seluruh Indonesia (Bapopsi) untuk mengoptimalkan pelak-

saan Pendidikan Jasmani di sekolah-sekolah yang meliputi intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan co-kurikuler, sehingga pelaksanaan Pendidikan Jasmani di sekolah dapat dilaksanakan minimal tiga kali dalam seminggu,” tegas anak buah Andriansyah itu.

Sementara, dukungan yang sama juga diberikan Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta. Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Purwosusilo mengatakan, pihaknya mendukung penuh kebijakan senam menjadi olahraga wajib di sekolah. Kebijakan ini perlu dilakukan dalam upaya membudayakan pola hidup bersih dan sehat.

“Disdik DKI mendukung seluruh pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik untuk melakukan senam bersama minimal sekali dalam seminggu. Materi senam sendiri juga sudah terintegrasi dalam mata pelajaran olahraga di seluruh tingkatan sekolah,” imbuh Purwosusilo menanggapi senam olahraga wajib di Sekolah. ● yan

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT. PLYMILINDO PERDANA
Berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan (lengkap selanjutnya disebut sebagai "Perseroan")

Dengan ini Direksi Perseroan mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") (lengkap selanjutnya RUPST) disebut sebagai "Rapat" yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 26 Juli 2023
Waktu : Pukul 09.00 WIB s/d selesai
Tempat : Kantor Perseroan, Rukan Permata Senayan Blok E No. 38 Jl. Tentara Pelajar, Jakarta Selatan 12210

Agenda Rapat:

1. Pemberian dispensasi atas keterlambatan penyelesaian Laporan Tahunan Perseroan
2. Penetapan dan persetujuan Atas Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Pertanggungjawaban Perseroan Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022
3. Pengesahan Neraca serta Pertimbangan Atas Ragu Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022
4. Penetapan pemberian penunjukan dan pembebasan tanggung jawab (excuse et discharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022
5. Pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan Akuntan Publik untuk Tahun Buku 2023 dan menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut dan persyaratan lainnya
6. Penetapan rencana kerja dan anggaran Perseroan untuk Tahun Buku 2023
7. Penetapan remunerasi dan tunjangan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
8. Dan lain-lain

Ketentuan:

1. Para Pemegang Saham diharapkan hadir paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum waktu Rapat yang telah ditentukan
2. Para Pemegang Saham dimohon hadir dalam Rapat dengan membawa asli KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan menyerahkan Foto Copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) kepada petugas pendaftaran
3. Para Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan memberikan asli surat kuasa, dengan ketentuan 3 (tiga) orang pemegang saham (dengan mengikatkan jumlah saham) hanya dapat diwakili oleh 1 (satu) orang Pemegang Kuasa dan TIDAK dapat diberikan kuasa substitusi. Pemegang Kuasa yang hadir dimohon untuk menyerahkan asli surat kuasa dengan penegasan jumlah saham yang diwakilkan dan serta melampirkan Foto Copy KTP Pemegang Kuasa dan asli KTP Pemegang Kuasa kepada petugas pendaftaran



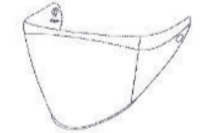


Jakarta, 10 Juli 2023
Direksi Perseroan

PENGUMUMAN DAN SOMASI TERBUKA TERHADAP HAK DESAIN INDUSTRI KACA HELM, HAK MEREK KACA HELM DAN HAK MEREK HELM YANG TELAH TERDAFTAR SECARA HUKUM ATAS NAMA SUMARNO

Berdasarkan hasil investigasi Kami Kami (SUMARNO) yang menjadi sebuah temuan dan/atau fakta hukum terhadap beberapa Toko Helm (Helmet dan Kaca Helmet) yang berada di Wilayah Hukum Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera, Bali, Lombok, Yogyakarta, Banten, Jakarta, Lampung, Palembang, Malang dan Palu, maka dengan ini Kami Para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada Kantor Hukum Revano & Partners Law Firm selaku Kuasa Hukum SUMARNO mengumumkan dan memberikan Somasi Terbuka kepada Publik dan/atau Masyarakat Umum khusus kepada Pelaku Usaha Helm dan Kaca Helm;

Bahwa kemudian terkait yang dimaksud tersebut diatas, dengan tegas secara hukum UNTUK TIDAK memproduksi/membuat, menduplikat/meniru, memakai/menggunakan, menjual dan/atau mendistribusikan barang dan/atau produk Helm dan Kaca Helm, yang mana dalam hal ini bentuk, jenis, merek dan desainnya menyerupai dan/atau memiliki kesamaan terhadap kaca helm dan helm milik klien Kami (SUMARNO);

Bahwa terhadap hak desain dan hak merek milik Klien Kami (SUMARNO) secara hukum telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Adapun bentuk desain dan merek kaca helm serta merek helm yang telah terdaftar tersebut sebagai berikut :

		
Desain Industri Kaca Helm No. IDD00000058166 Perlindungan Konfigurasi	Desain Industri Kaca Helm No. IDD00000058167 Perlindungan Konfigurasi	Desain Industri Kaca Helm No. IDD00000061284 Perlindungan Konfigurasi
		
Desain Industri Kaca Helm No. IDD00000061286 Perlindungan Konfigurasi	Desain Industri Kaca Helm No. IDD0000063207 Perlindungan Konfigurasi	
NORISK IDM000445984 Perlindungan Merek	JUST 1 IDM000604985 Perlindungan Merek	VRC IDM000122825 Perlindungan Merek

Bahwa setelah pengumuman dan somasi terbuka ini kami buat dan ditayangkan pada Media Cetak dan/atau Koran Internasional Media, maka setiap orang dianggap mengetahuinya. Apabila Publik dan/atau khalayak ramai dan/atau masyarakat Umum baik pelaku usaha maupun perorangan yang memproduksi/membuat, menduplikat/meniru, memakai/menggunakan, menjual dan/atau mendistribusikan barang dan/atau produk helm dan kaca helm, yang mana dalam hal ini bentuk, jenis, merek dan desainnya menyerupai dan/atau memiliki kesamaan terhadap kaca helm dan helm milik klien Kami (SUMARNO), maka kami akan menempuh upaya hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia baik secara pidana maupun perdata.

Demikian pengumuman dan somasi terbuka ini kami buat untuk dapat diketahui dan dipahami oleh Publik dan/atau Masyarakat Umum khusus Pelaku Usaha Helm dan Kaca Helm. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Serang, 10 Juli 2023

Horat Kami,

KUASA HUKUM SUMARNO

M. RICKY REVANO, SH.

HENDI EFFENDI, SH.

AGUS SOFYAN, SH.

Menparekraf: Kawasan Bekasi Potensi Tempat Wisata Bisnis

BEKASI (IM) - Menteri pariwisata dan ekonomi kreatif (Menparekraf), Sandiaga Uno menyebut Kota Bekasi berpotensi memiliki wisata berbasis bisnis.

“Itu adalah wisata yang berkaitan dengan pertemuan dengan kegiatan perusahaan dengan kegiatan pameran, dan kegiatan eksibisi,” ujar Sandiaga Uno di balai kota Pemkot Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (8/7).

Lebih lanjut dikatakan, Bekasi merupakan daerah penyangga ibu kota, kemudian Jakarta dirasakan Sandi sudah terlalu sesak hingga kebutuhan pangan, sandang dan papan jauh lebih mahal.

“Dan ini sangat cocok, karena Bekasi merupakan destinasi yang sangat dekat dengan Jakarta, dan karena Jakarta ini semua serba penuh dan mahal,” jelasnya.

Maka dari itu, ia menganalisa bila Bekasi dapat mencerna peluang tersebut untuk dijadikan potensi pariwisata dan ekonomi kreatif. Bila Bekasi dapat menerima peluang itu, maka akan tercipta lapangan kerja.

“Produk UMKM-nya juga yang akan kita dorong dan akan menciptakan 4,4 juta lapangan kerja di 2024,” kata Sandiaga Uno.

Di antara beberapa produk yang ia lihat di Bekasi, terdapat sejumlah nama yang berpotensi

jadi ikon Bekasi, yaitu Dodol Betawi dan kudapan Sayur Gabus Pucung.

“Saya lihat tadi yang paling potensi ada oleh-oleh dodol Mpok Nini, sama seni pertunjukan tadi Sanggar Indrakusuma, terus batik dan Bir Pletok,” imbuhnya.

Dengan hal ini, produk tersebut sangat penting untuk berkolaborasi dengan destinasi wisata yang di wilayah Bekasi

“Jadi, produk-produk ini lah yang bisa dipadupadankan dengan wisata bisnis sehingga nanti memberikan peluang bagi para pelaku UMKM untuk peningkatan kesejahteraan,” pungkasnya. ● yan

3 Rumah Nyaris Tergerus Longsor di Sawangan, Belum Ada Penanganan dari Pemerintah

DEPOK (IM) - Tiga rumah yang nyaris tergerus longsor di RT 03 RW 02 Kelurahan Pasir Putih, Sawangan, Depok, kondisinya makin memprihatinkan. Pemilik rumah mengaku resah karena hingga kini belum ada penanganan dari pemerintah.

Kondisi rumah di Sawangan sangat memprihatinkan lantaran sudah berada di bibir longsor. Warga pun terpaksa harus menutup tebing longsor setinggi 15 meter ini dengan terpal untuk menghambat longsor susulan.

Menurut salah satu warga, Gonan, longsor terjadi karena gunung sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipayang yang sudah overload.

Sampah lama-lama terdorong hingga terjadi penyempitan Kali Pangsangrahan dan menyebabkan longsor.

“Dulu mah di sana. Sekitar

100 meter. Dulunya ini ada dua rumah tetapi hilang karena longsor. Ini kan bawahnya mata air,” kata Gonan, salah satu warga, Minggu (9/7).

Dia meminta agar pemerintah segera bertindak. Jika dibiarkan warga khawatir bisa mengancam keselamatan.

“Sudah tiga rumah hilang karena longsor. Dulunya di sana itu rumah ada satu, di sini dua,” ujarnya.

Sedikit demi sedikit tanah amblas dan terjadi longsor akibat terdorong gunung sampah. Bahkan terjadi penyempitan dan pembelokan kali yang ada di dekat TPA. Di lokasi itu dulunya adalah kebun milik warga namun kini hilang karena longsor terdorong sampah.

“Penyebab sampah, dulu kebon sekarang sampah. Longsor bikin tanah turun,” ungkapnya.

Pemerintah berencana merelokasi warga namun hal itu belum juga dilakukan. Warga pun meminta agar pemerintah serius mengatasi persoalan ini.

“Katanya mau direlokasi tetapi belum jelas. Rencana sudah lama dari kapan tetapi tidak ada hasilnya. Ini bahaya karena terkikis, khawatir kalau tidak diurusin. Ada 3 rumah hilang karena longsor. Yang rawan ada 7 rumah,” ucapnya.

Gonan pun hanya bisa berharap pemerintah bisa peka terhadap permasalahan ini. Dia sempat mendengar warga akan direlokasi pada 2022. Namun hingga kini belum ada realisasi apa pun.

“Maunya dipercepat relokasinya, tetapi warga tidak bisa apa-apa. Ada yang ninjau tetapi cuma lihat doang. Kan warga harus nunggu kapan belum pasti,” pungkasnya. ● yan